

Kertas Posisi

# MENITI JALAN PULANG:

Membawa Anak-anak Timor-Leste yang Dicuri dan Dibawa ke Indonesia untuk Bertemu Kembali dengan Keluarga Mereka



Asosiasaun  
Chega! Ba Ita



2016

*Nanti kalau sudah ketemu, saya senang sekali.  
Sudah sampai di sini, setelah 35 tahun.*

**Dominggus Sampelan**

*Jadi inilah cerita saya. Mungkin cerita saya adalah cerita yang bagus.  
Tapi ada orang yang tidak memiliki kesempatan seperti saya.  
Kenyataannya, kita telah kehilangan bahasa dan budaya juga mempengaruhi kita secara psikologis. Ini adalah pengalaman anak-anak yang dibawa pergi pada masa anak-anak, seperti saya. Kami tidak ingin membebani Timor-Leste yang sudah merdeka, dengan mendesakkan “tugas yang belum selesai” ini kepada pemerintah. Kami hanya ingin mencari keluarga kami. Karena bagaimanapun kita semua memiliki keluarga, ibu, ayah, kakak adik, dan kami punya tempat lahir. Itu yang paling penting.*

**Victor da Costa**

*Sebelum saya dipisahkan dari ayah saya,  
dia berkata, “Kamu harus kuat, jujur, dan berani.”  
Saya teringat kata-kata ini terus-menerus.  
Ketika orang-orang yang membawa saya kejam kepada saya,  
saya berpegang pada kata-kata tersebut. Saya berpegang pada kebenaran.  
Saya bukan diambil tidak jelas asalnya. Tapi karena dia [yang membawa saya ke Indonesia] seorang tentara, dia selalu benar.  
Saya hidup di bawah tekanan.*

**Isabelinha Pinto**

## Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif .....	3
Pengantar .....	3
Konteks Sejarah.....	4
Inisiatif dan Komitmen dalam Penanganan Anak yang Dicuri.....	6
Kerangka Hukum .....	8
Temuan-temuan .....	8
Terasing dan dikungkung rindu.....	10
Gamang karena berganti identitas .....	11
Mengalami trauma dan cacat fisik akibat perang .....	12
Mengalami eksploitasi, perbudakan, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi .....	12
Anak perempuan: rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi berbasis gender .....	13
Hidup telantar: Kondisi ekonomi yang sulit dan tidak mendapat pendidikan serta pekerjaan yang layak .....	14
Kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan .....	14
Tantangan saat reuni .....	15
Tidak mendapat jaminan keamanan dan kepemilikan atas lahan .....	15
Rekomendasi .....	16
Lampiran .....	17

## Ringkasan Eksekutif

Sejak 2013 sampai 2016, AJAR dan kelompok masyarakat sipil lainnya bekerja sama dengan Komisi Nasional HAM Indonesia dan Provedor untuk Hak Asasi dan Keadilan Timor-Leste untuk mencari anak-anak yang dicuri dari Timor-Leste dan dibawa ke Indonesia selama konflik dari 1975-1999. Sampai saat ini, kami telah mendokumentasikan cerita dari 65 orang, 30 di antaranya berpartisipasi dalam reuni dengan keluarga mereka di Timor-Leste.

CAVR, komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Timor-Leste (2002-2005), telah mengumpulkan dan menelaah lebih dari 8.000 kesaksian yang berkaitan dengan periode konflik 1974-1999. CAVR memperkirakan bahwa ribuan anak-anak Timor telah dipindahkan secara paksa ke Indonesia selama periode ini. CAVR menemukan bahwa “praktik umum pengambilan anak-anak ini menunjukkan pandangan bahwa dengan menguasai wilayah Timor-Leste, Indonesia memiliki kekuasaan tak terbatas terhadap anak-anak... Anggota ABRI dan orang lain yang berkuasa di Timor Leste merasa berhak untuk mengambil anak Timor-Leste tanpa izin dari orang tua mereka.”

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia dan Timor-Leste secara bersama membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor-Leste, dengan berisikan komisioner dari kedua Negara. Laporan KKP pada 2008 memperkuat rekomendasi CAVR terkait kasus anak yang diambil paksa dan merekomendasikan agar kedua Negara membentuk komisi yang salah satu mandatnya adalah mencari anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka. Pada Oktober 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden tentang rencana aksi pelaksanaan rekomendasi KKP. Namun hingga laporan ini dibuat, semua rekomendasi berkaitan orang

hilang dan anak-anak yang dipisahkan belum juga diimplementasikan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, kami menemukan bahwa sebagian kecil dari mereka dapat hidup dalam kondisi baik. Sementara itu, sebagian besar dari mereka menghadapi kesulitan ekonomi, hidup di rumah yang tidak layak, tidak memiliki tanah, dan tidak mendapat pekerjaan yang layak karena rendahnya tingkat pendidikan. Hampir semua dari anak-anak tersebut masih bergulat dengan trauma yang belum terselesaikan. Sebagian besar anak diambil tanpa persetujuan dari orang tua. Janji akan mendapat pendidikan yang lebih baik tidak pernah terwujud. Banyak dari mereka yang diabaikan, baik oleh orang tua yang “mengadopsi” atau lembaga yang memelihara mereka. Sebagian lainnya tinggal bersama keluarga yang tidak mampu menyekolahkan mereka. Beberapa diantara mereka bahkan bertahan hidup sendirian di jalanan.

Kami mendesak agar dilakukan upaya yang serius untuk membantu **menyatukan kembali anak-anak yang dicuri** dari Timor-Leste dengan anggota keluarga mereka. Meskipun sekarang mereka telah dewasa, pengambilan mereka harus dilihat sebagai pelanggaran HAM yang masih berlangsung. Oleh karena itu, langkah nyata harus dibuat untuk membantu mereka bersatu kembali dengan keluarga mereka dan membangun kembali kehidupan mereka. Rekomendasi yang lebih rinci kami sajikan di akhir laporan ini.

## Pengantar

Pada April 2013, AJAR memfasilitasi kunjungan “anak-anak yang dicuri”<sup>1</sup> ke Timor-Leste untuk bertemu dengan keluarga mereka. Anak-anak yang saat ini sudah dewasa tersebut merupakan orang yang diambil secara paksa ke Indonesia

1 Kasus anak-anak Timor-Leste yang terpisah dari keluarga selama konflik memiliki spektrum yang luas dan tersebar di banyak peristiwa kekerasan. Istilah “anak-anak yang dicuri” yang kami gunakan merujuk kepada pengambilan anak di bawah 18 tahun yang dibawa ke Indonesia oleh pejabat publik atau sepengetahuan pejabat publik pada masa konflik 1975-1999, yang dilakukan tanpa persetujuan keluarga atau wali mereka. Namun begitu, dalam pemaparan laporan ini kami juga menggunakan istilah “diambil paksa” dan “dipisahkan paksa” secara bergantian.

pada masa konflik di Timor-Leste tahun 1975-1999.<sup>2</sup> Tidak ada angka yang pasti, namun diperkirakan ribuan anak telah diambil pada periode konflik tersebut.

Dua komisi untuk mengungkap kebenaran, yaitu Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR, 2005)<sup>3</sup> Timor-Leste dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor-Leste (KKP, 2008)<sup>4</sup> merekomendasikan bahwa pemerintah Indonesia dan Timor-Leste melakukan langkah nyata untuk mencari anak-anak ini (kini kebanyakan telah dewasa) dan memfasilitasi reuni dengan keluarga mereka.

Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang diambil paksa ketika masih anak-anak masih bergulat dalam trauma dan hidup menderita karena dampak dari kekerasan yang mereka alami. Hal ini mendorong kami untuk melakukan pencarian, reuni lanjutan dan mengungkapkan apa yang terjadi kepada mereka. Selanjutnya, AJAR bekerjasama dengan KontraS, IKOHI, ELSAM di Indonesia dan Asosiasi Korban dan HAK di Timor-Leste dan bergabung menjadi bagian dari sebuah gugus kerja bersama Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) Indonesia dan Provedor untuk Hak Asasi dan Keadilan (PDHJ) Timor-Leste.

Kami menghadapi tantangan besar dalam setiap tahapan proses ini. Mulai dari minimnya informasi mengenai identitas dan keberadaan anak-anak terutama karena sebagian besar dari mereka sudah

berganti identitas dan berpindah tempat, sebagian lain belum lepas dari trauma sehingga tidak berani untuk berbicara tentang dirinya, dan kurangnya dukungan dari institusi pemerintahan terkait penyediaan dokumen dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan administrasi. Namun kami pun mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti keterbukaan beberapa purnawirawan TNI dalam memberikan informasi keberadaan anak-anak yang pernah dibawa prajurit selama masa konflik, pejabat lokal yang bersimpati, dan dukungan media dalam meliput kegiatan reuni di Dili yang mendorong antusiasme peserta reuni untuk mencari informasi baru terkait keberadaan teman-teman mereka yang memiliki nasib sama dan belum dapat bertemu keluarga mereka.

Laporan ini melingkupi kegiatan dari pencarian dan 3 kali kegiatan reuni yang dilakukan dari tahun 2013 hingga 2016. Laporan ini memuat temuan yang diperoleh dari wawancara mendalam, workshop pemulihan, dan informasi terkait yang berhasil dikumpulkan. Laporan ini juga memuat rekomendasi kepada kedua pemerintahan dan masyarakat internasional.<sup>5</sup>

## Konteks Sejarah

CAVR, dibentuk oleh PBB pada 2001 dan telah mengumpulkan dan menelaah 8000 kesaksian terkait konflik 1975-1999. CAVR memperkirakan bahwa ribuan anak-anak

- 2 Pada April 2013, AJAR memfasilitasi kunjungan empat orang anak yang dipindahkan secara paksa (dua dari Jakarta dan dua dari Timor Barat) selama satu minggu. Kami juga menyelenggarakan workshop di Dili bersama empat orang lainnya yang telah kembali kepada keluarga mereka. Provedor untuk Hak Asasi Manusia (PDHJ), Komisioner untuk Hak Anak, dan pejabat dari Kementerian Luar Negeri Timor-Leste hadir dan berbicara pada kegiatan tersebut.
- 3 CAVR adalah sebuah komisi yang dibentuk oleh Pemerintahan Sementara PBB di Timor-Leste dengan mandat menetapkan kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam periode konflik 1975-1999 di Timor-Leste. Informasi lebih lanjut mengenai laporan CAVR dapat dilihat di [www.chegareport.net](http://www.chegareport.net) dan situs CAVR [www.cavr-timorleste.org](http://www.cavr-timorleste.org)
- 4 Komisi Kebenaran and Persahabatan (KKP) adalah prakarsa bersama Indonesia dan Timor-Leste yang mulai bekerja pada Agustus 2005 sampai Maret 2008. Mandat KKP diantaranya mengungkap kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia sebelum dan sesudah Jajak Pendapat di Timor-Leste 1999 dan membuat rekomendasi untuk menyembuhkan luka masa lalu dan memperkuat persahabatan berdasarkan catatan sejarah bersama. Laporan KKP, *Per Memoriam Ad Spem*, 2008, dapat dilihat di <http://www.chegareport.net/wp-content/uploads/2014/10/CTF-laporan-akhir-20081.pdf>.
- 5 Laporan ini ditulis oleh Selviana Yolanda, Achunk Nassrum, Dodi Yuniar, Isabelinha Pinto, Galuh Wandita dan Karen Campbell-Nelson berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh gugus kerja masyarakat sipil, diterbitkan bersama oleh AJAR, KontraS, IKOHI, HAK Association, ACBIT, Asosiasi Nasional Korban Timor-Leste.

Timor-Leste dipindah paksa ke Indonesia selama masa konflik tahun 1975-1999.<sup>6</sup> Walau pada awalnya dilakukan secara individual oleh para prajurit di medan laga, praktik pemindahan anak-anak ini kemudian terlembaga, dilakukan oleh institusi militer maupun lembaga amal dan keagamaan. Menurut CAVR, “praktik umum pengambilan anak-anak ini menunjukkan pandangan bahwa dengan menguasai wilayah Timor-Leste, Indonesia memiliki kekuasaan tak terbatas terhadap anak-anak... Anggota ABRI dan orang lain yang berkuasa di Timor Leste merasa berhak untuk mengambil anak Timor-Leste tanpa ijin dari orang tua mereka.”<sup>7</sup>

Pada awal masa konflik, para prajurit mengambil anak laki-laki yang direkrut menjadi “tenaga bantuan operasional” atau TBO<sup>8</sup> dan menaikkan mereka ke atas kapal yang memulangkan kesatuan. Pada kunjungan reuni pada bulan Mei 2016, Gregorio Muslimin (Gregorio Fernando) bertemu keluarganya untuk pertama kalinya setelah terpisah sejak tahun 1975. Dia diambil pada saat ia berumur 11 tahun.

*Tahun 1975 dijemput oleh satu regu pasukan TNI Batalyon 310. Tahun 1976, saya dijadikan tukang masak tentara Batalyon 310 dan 330. Selanjutnya jadi pembantu tentara di Batalyon 724. Tahun 1977 saya ikut ke Indonesia untuk sekolah. Keberangkatan saya tidak diketahui keluarga. Sampai di Sulawesi Selatan saya tinggal dengan Bapak AS. Ia menyiksa saya dan saya lari. Selanjutnya saya tinggal dengan Bapak SY. Lalu saya diserahkan ke Pak JF dan diserahkan lagi ke Pak ND tahun 1979. Sejak saat itu saya mulai sekolah di SD. Saya tidak pernah ada hubungan dengan keluarga, dan keluarga pun tidak tahu saya masih hidup atau meninggal.<sup>9</sup>*

Anak-anak perempuan, khususnya mereka yang terpisah dari keluarganya maupun yang diambil dari keluarganya, juga dibawa dalam kapal-kapal ini, walaupun dalam jumlah yang relatif lebih kecil.

Pada tahun 1980an, ada upaya pemerintah untuk menghentikan pengambilan anak-anak oleh para prajurit. Namun kemudian berbagai yayasan amal dan keagamaan mendapat dukungan untuk memfasilitasi pemindahan anak-anak ke Indonesia. Yayasan-yayasan yang didirikan Soeharto memiliki peran penting dalam pendanaan bagi lembaga-lembaga tersebut. Walau sebagian anak-anak yang dicuri melalui proses ini mendapat pendidikan yang cukup baik, mereka diambil tanpa ijin orang tua dan tanpa upaya untuk merawat komunikasi dengan keluarga mereka.

Muslim Maumoto mengingat penderitaan yang dialaminya bertahan hidup di sebuah pesantren di Sulawesi Selatan:

*Pada 1985 saya dibawa ke Kuluhun. Saya sekolah di SD di Nassau Bidau. Ada program yang dilakukan oleh ICMI untuk mengirimkan anak-anak dari Timor-Timur ke Indonesia. Saya kelompok kedua yang dikirim. Saya bersama anak-anak lain sekitar 27 orang semuanya, kelompok pertama dan kedua. Kami dibawa ke Maros, Macopa. Kami dibawa ke pesantren ... saya tinggal di sana selama 3 tahun. Tiga teman saya meninggal karena penyakit beri-beri. Beberapa anak ada yang kabur. Tapi saya bertahan. Apapun yang terjadi, saya harus lulus. Kadang-kadang di pesantren, kami tidak diberi makan. Kami kerja apa saja, potong ayam, gali sumur, mengumpulkan sedikit uang agar bisa*

- 6 CAVR mengutip kesaksian perwakilan UNHCR pada Audiensi Publik Nasional CAVR pada Maret 2004, yang menyebutkan sekitar 4,534 anak telah dipindahkan selama periode 1976-1999. Lihat laporan CAVR *Chega!*, Bab 7.8: Pelanggaran Hak Anak, 7.8.4. Pemindahan Anak-anak ke Indonesia, paragraf 355, hal. 85; <http://cavr-timorleste.org/chegaFiles/finalReportIndo/07.8-Pelanggaran-Hak-Anak.pdf>
- 7 Laporan CAVR Bab 7.8, paragraf 348, hal. 83; <http://cavr-timorleste.org/chegaFiles/finalReportIndo/07.8-Pelanggaran-Hak-Anak.pdf>
- 8 “Penduduk sipil direkrut paksa sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO). Secara resmi ABRI merekrut penduduk sipil lelaki berusia 12-35 tahun, namun kenyataannya, anak laki-laki yang jauh lebih muda dan pria dewasa yang jauh lebih tua, serta para perempuan, juga dilibatkan.” Paragraf 367, hal. 94, Mobilisasi Massal Penduduk Sipil, “Pagar Betis”: Operasi Kikis, Bagian 3: Sejarah Konflik, *Chega!*, Dili, 2005; <http://www.cavr-timorleste.org/chegaFiles/finalReportIndo/03-Sejarah-Konflik.pdf>
- 9 Wawancara dengan Gregorio Muslimin, Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan, 22 Agustus 2015.

*makan. Hal ini terjadi selama tiga tahun.<sup>10</sup>*

Praktik pengambilan anak terus berjalan pada tahun 1990an. Salah seorang anak yang ditemukan oleh tim AJAR, Mustafa Daud (Mauco'o), menyatakan:

*Tahun 1994 saya dibawa dari Dili oleh pembina panti asuhan di Sulawesi Selatan waktu berusia 11 tahun. Saat dibawa, orang tua tahunya [saya] mau disekolahkan. Saya dibawa bersama 17 anak lain. Kami semua ditaruh di dek kapal ... selama 3 hari 2 malam. Setibanya di Makassar, kami ditampung di sebuah panti asuhan. Kami makan seadanya dan sering mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, dicambuk. Tahun 1995 saya minta pindah ke pesantren lain dan mendapat perlakuan lebih baik. Apa yang saya alami..., kami mengalami luka batin terlebih ada kabar bahwa ayah saya meninggal di Timor. Saya semakin sedih ingin pulang tetapi tidak ada biaya.<sup>11</sup>*

Kekerasan sekitar referendum tahun 1999 mengakibatkan terjadinya sebuah gelombang pengungsian ke wilayah Timor Barat, Indonesia. Dalam kegentingan yang terjadi, diperkirakan 4500-5000 anak yang terpisah dari keluarganya.<sup>12</sup> Sebagian anak-anak dipindahkan dari keluarga mereka di kamp-kamp pengungsian ke panti asuhan di Jawa dan Sulawesi.<sup>13</sup> Ada orang tua yang memberi ijin karena menginginkan tempat yang aman dan kesempatan belajar bagi anak-anak mereka, namun kemudian kontak terputus. Pada tahun 2004, ketika Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menutup program pemulangan pengungsi kembali ke Timor-Leste, mereka berhasil

memulangkan 2000 anak dari 4500 kasus yang tercatat terkait kasus kekerasan tahun 1999.<sup>14</sup>

## Inisiatif dan Komitmen dalam Penanganan Anak yang Dicuri

Pada tahun 2003, CAVR membentuk tim peneliti untuk melihat dampak dari konflik terhadap anak-anak dan memperdengarkan kesaksian anak-anak dalam mendengar kesaksian publik.<sup>15</sup> CAVR juga memfasilitasi kunjungan reuni Yuliana (Bileki), yang diambil pada 1979, untuk bertemu keluarganya di Ainaro. Laporan CAVR merekomendasikan agar kedua pemerintah memperhatikan anak-anak Timor-Leste yang dibawa ke Indonesia dan masih terpisah dari keluarga dan memberikan kesempatan untuk berhubungan dan bertemu kembali, termasuk bebas menentukan masa depan mereka.

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia dan Timor-Leste secara bersama membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor-Leste, dengan berisikan komisioner dari kedua Negara. Pada tahun 2008, KKP menyerahkan laporannya kepada presiden kedua Negara yang isinya memperkuat rekomendasi CAVR terkait kasus anak yang diambil paksa dan merekomendasikan agar kedua Negara membentuk komisi yang salah satu mandatnya adalah mencari anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka. Merespon rekomendasi KKP, pada Juli 2009 pemerintah Timor-Leste sempat

10 Kesaksian Mustafa dalam workshop di Dili, April 2013.

11 Wawancara dengan Mustafa Daud, Makassar, Sulawesi Selatan, 26 September 2015.

12 UNHCR menyebutkan sekitar 4535 kasus yang tercatat (lihat juga catatan kaki nomor 6), sementara itu, ICRC menyebutkan bahwa sekitar 5000 anak telah dipisahkan. Lihat juga Prabha Chandran, "Mending East Timor's Broken Families," International Federation of Red Cross, Red Crescent Societies, 15 April 2004, <http://www.ifrc.org/en/news-and-media/news-stories/asia-pacific/timor-leste/mending-east-timors-broken-families/>

13 Dan Murphy, "In Indonesia: a generation of 'orphans' from East Timor," *Christian Science Monitor*, 10 September 2002, <http://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-generation-orphans-east-timor>

14 "Solutions found for East Timor's separated children," UNHCR, 14 Desember 2004, <http://www.unhcr.org/news/latest/2004/12/41bf02f04/solutions-found-east-timors-separated-children.html>

15 Tim ini dipimpin oleh Helene van Klinken yang melanjutkan penelitian atas topik ini sebagai bagian penelitian doktoralnya dan dibukukan dengan judul *Making them Indonesians: Child Transfers out of East Timor* oleh Monash University tahun 2012. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Anak-anak Tim-Tim di Indonesia: Sebuah Cermin Masa Kelam*, KPG: Jakarta, 2014.

mengajukan proposal agar Pemerintah Indonesia mempertimbangkan pembentukan *sub-working group* dalam mekanisme bilateral untuk menangani isu orang hilang. Lalu pada Oktober 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden tentang rencana aksi pelaksanaan rekomendasi KKP.<sup>16</sup> Namun hingga laporan ini dibuat, semua rekomendasi terkait orang hilang dan anak-anak yang terpisah belum juga diimplementasikan.<sup>17</sup>

Upaya-upaya untuk menangani anak yang dipisahkan kian memudar, seiring dengan berjalannya waktu. Pada 2012, muncul upaya untuk mempertemukan anak-anak yang dipisahkan dari keluarga mereka lewat sebuah situs internet, yang dilakukan oleh para penyintas dan mantan peneliti CAVR.<sup>18</sup> Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mencatat bahwa upaya penanganan “orang yang terpisah” oleh pemerintah Indonesia dan Timor-Leste tidak memiliki kemajuan berarti.<sup>19</sup> Di waktu yang bersamaan, mereka memfasilitasi pertemuan beberapa anak yang terpisah dengan keluarga mereka.<sup>20</sup>

Inisiatif yang dijalankan AJAR merupakan bagian dari upaya mendorong kedua pemerintah untuk melakukan langkah konkrit dalam penanganan isu ini. Pada 2013 Komnas HAM dan mitranya, Provedor untuk Hak Asasi Manusia Timor-Leste (PDHJ) menandatangani sebuah MoU untuk menindaklanjuti rekomendasi

KKP. Pada Februari 2014, Komnas HAM membentuk tim pengumpul data untuk anak yang dipindahkan dari Timor-Leste ke Indonesia antara 1975-1999.

Sementara itu, pada April 2013, AJAR memfasilitasi kegiatan reuni dan workshop di Dili. Satu tahun kemudian, bekerjasama dengan para penyintas, KontraS, Elsam, IKOHI, dan Yayasan HAK, kami mulai melakukan pencarian terhadap anak-anak yang dicuri dan keberadaan keluarga mereka. Proses di Indonesia berjalan cukup lambat dan memakan tenaga cukup besar, terutama saat melakukan pencarian. Begitu juga dengan proses di Timor Leste, saat proses mengidentifikasi dan pencarian keluarga mendapat cukup banyak tantangan. Dalam beberapa kasus orang yang berhasil ditemukan sudah sulit membuka kembali detail ingatan masa kecil mereka, saat mereka diambil. Sementara itu, banyak orang tua di Timor-Leste yang sudah meyakini bahwa anak mereka telah meninggal dan berdoa di depan batu nisan anak mereka selama 30 tahun, sebelum kemudian mereka menemui kenyataan bahwa anak mereka ternyata masih hidup.

Pada 2015 dan 2016, Komnas HAM dan PDHJ, bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil di atas, memfasilitasi dua kali reuni yang diikuti oleh mereka yang telah ditemukan dan bersedia untuk berpartisipasi. Secara keseluruhan, kami telah mempertemukan 30 orang anak dengan keluarga mereka dan mendokumentasikan 65 orang anak yang dulu diambil paksa.

16 Lihat Perpres No.72 Tahun 2011 tentang “Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste, [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_perundangan&id=2776&task=detail&catid=6&Itemid=42&tahun=2011](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=2776&task=detail&catid=6&Itemid=42&tahun=2011)

17 Lihat laporan penelitian AJAR; Budi Hernawan dan Pat Wlash; *Inconvenient Truths: The Fate of the Chega! And Per Memoriam Ad Spem Reports on Timor-Leste*; Jakarta, 2015. Bisa diakses pada: <http://asia-ajar.org/2015/09/inconvenient-truth-the-fate-of-the-chega-and-per-memoriam-ad-spem-reports-on-timor-leste/>

18 <http://en.istoriaku.org/about-us/>

19 <http://www.refworld.org/pdfid/5374afa00.pdf>

20 “PMI akan pertemukan keluarga yang terpisah,” 27 November 2014; <http://www.pmi.or.id/index.php/berita-dan-media/kisah/k2-categories/item/340-pmi-akan-pertemukan-keluarga-yang-terpisah.html>

## Kerangka Hukum

Penculikan dan pemindahan paksa terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal 328, 330, dan 333. Indonesia juga telah menjadi negara pihak dari Konvensi Jenewa (1949) pada 30 September 1958, yang membuat Indonesia berkewajiban untuk melindungi anak-anak pada waktu konflik.<sup>21</sup> Lebih jauh, pada bulan September 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yang diadopsi dalam Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Lalu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Pelakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, yang telah diadopsi menjadi Undang-Undang RI No 9 Tahun 1998, serta menandatangani Konvensi tentang Perlindungan Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa pada 2010.

Para ibu dan nenek Plaza de Mayo di Argentina mendesak pengakuan internasional agar penghilangan paksa merupakan pelanggaran yang masih berlangsung. Para ibu mendesak agar pemerintah terus melakukan pencarian orang hilang karena, tidak seperti pembunuhan, korban dan keluarga korban penghilangan masih terjerat dalam kejahatan tersebut, terkatung-katung dalam ketidaktahuan. Kejahatan masih berlangsung terus sampai keberadaan mereka yang hilang berhasil ditemukan. Demikian pula, untuk anak-anak yang dicuri, mereka masih hidup dalam penculikan sampai mereka bersatu kembali dengan keluarga mereka. Sayangnya, waktu telah banyak terbuang dan mereka kini telah menjadi dewasa. Hal ini dapat saja membuat kondisi mereka telah melampaui perjanjian atau pedoman-pedoman PBB<sup>22</sup> yang dibuat untuk melindungi anak-anak. Sebuah kerangka hukum yang lebih kuat perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa pencarian anak-anak yang diculik tetap menjadi prioritas, tanpa melihat waktu yang telah berlalu.

## Temuan-temuan

Dari 2013 sampai pertengahan 2016, AJAR berhasil mendata 65 orang sebagai anak yang dipindahkan dari Timor-Leste ke Indonesia. Mereka terdiri dari 12 perempuan dan 53 laki-laki, yang tersebar di 8 propinsi. Proses pencarian rata-rata memakan waktu 4-5 bulan setiap tahunnya. Walaupun mendapat informasi yang cukup banyak namun tim pencari mengalami kesulitan saat melakukan penelusuran, terutama saat mengunjungi institusi militer maupun lembaga keagamaan yang menilai bahwa informasi yang diminta merupakan informasi yang sensitif. Tabel di bawah menunjukkan sebaran dan jumlah anak-anak yang dicuri yang berhasil didokumentasikan.



**Marciano di rumahnya di Jakarta.** Marciano diambil oleh tentara saat bersama enam teman-temannya ketika berjalan pulang dari sekolah di Hatudo, Ainaro. Selama menjadi TBO, ia ditembak di Los Palos dan dikirim ke Jakarta untuk perawatan pada tahun 1982. Kakinya diamputasi dan menggunakan kaki palsu. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai penjaga keamanan di Jakarta. (Sigit D. Pratama untuk AJAR, 2016)

- 21 Konvensi Jenewa IV mewajibkan Negara pihak untuk “menjamin bahwa pemindahan atau pengungsian penduduk dilakukan hanya jika ada alasan yang tidak terhindarkan dan masih berada di dalam wilayah yang dikuasai atau diduduki, dan anggota keluarga yang sama tidak dipisahkan; harus memelihara anak-anak yatim piatu tahun atau yang terpisahkan dari orang tua mereka; mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi anak-anak dan mendata orang tua mereka; memberi bantuan agar lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pemeliharaan terhadap anak dapat berjalan secara baik; dan tidak mengubah identitas diri anak-anak atau memasukkan mereka ke lembaga yang berada di bawah kekuasaan pihak yang berkuasa.”
- 22 Kelompok Kerja Dewan Keamanan PBBN tentang Anak dan Konflik Bersenjata menyebutkan terdapat enam jenis pelanggaran terhadap anak, salah satunya adalah penculikan.



**Tabel 1. Sebaran anak yang dipindahkan yang berhasil didokumentasikan**

Tahun Wilayah	2013	2014	2015	Agustus 2016	Total
DKI Jakarta	1	5	1	2	9
Jawa Barat	1	3		6	10
Kalimantan Timur		5	1		6
Kalimantan Selatan			1		1
Sulawesi Selatan			19	13	32
Bali		2	2		4
NTT	2				2
Banten		1			1
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>65</b>

Sebanyak 30 orang diantaranya berpartisipasi dalam reuni yang difasilitasi bersama gugus kerja yang disebutkan di atas, termasuk Komnas HAM dan PDHJ. Tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan reuni. Beberapa orang belum bersedia untuk terlibat karena masih diliputi oleh keraguan dan ketakutan akan keselamatan mereka atau tidak mendapat ijin dari keluarga, beberapa orang tidak dalam kondisi fisik yang baik, tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk bepergian ke luar negeri, atau karena keluarga mereka di Timor-Leste belum berhasil ditemukan.

**Tabel 2. Jumlah anak yang dipisahkan yang terlibat dalam reuni**

Tahun	Jumlah	
	Perempuan	Laki-laki
2013	2	2
2015	2	12
2016	2	10
Total	6	24

Saat tim bertemu dengan mereka, sebagian dari mereka hidup dalam kondisi baik, namun, banyak juga dari mereka yang hidup dalam penderitaan. Cerita-cerita dari mereka, yang muncul baik saat wawancara atau saat mengikuti workshop pemulihan, menunjukkan bahwa proses pemindahan mereka ke Indonesia umumnya tidak berdasar ijin atau sepengetahuan orang tua mereka. Sebagian orang tua memberi ijin setelah mendapat janji bahwa anak mereka akan disekolahkan dan dikembalikan. Beberapa anak pergi ke Indonesia dengan harapan mendapat masa depan yang lebih baik.

Tetapi harapan untuk bisa sekolah tidak terwujud, sebagian karena ditelantarkan baik oleh “bapak angkat” atau oleh yayasan yang membawa mereka, sementara sebagian lain karena hidup bersama keluarga yang kondisi ekonominya sulit sehingga tidak mampu menyekolahkan mereka. Umumnya mereka hanya tamat SD dan sebagian kecil menyelesaikan pendidikan hingga SMP dan SMA.

Sebagai akibatnya, saat dewasa mereka sulit mengakses pekerjaan yang layak. Mereka harus berjuang meneruskan hidup dalam kesendirian, jauh dari keluarga, terlantar dan terlunta-lunta. Mereka harus menanggung keterasingan ketika secara terpaksa berganti nama dan agama mengikuti keluarga angkat mereka. Hampir semua tidak memiliki dokumen diri yang lengkap. Sebagian orang bahkan mengalami penganiayaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Sementara sebagian orang menderita cacat fisik karena luka tembak yang mereka dapatkan saat menjadi TBO. Mereka dipaksa bekerja untuk kebutuhan keluarga angkat mereka dan tidak mendapat perawatan dan perlindungan yang layak.

### Isabelinha Pinto (Serlina Sembel)<sup>3</sup>

Isabelinha Pinto baru berumur 5 tahun ketika pada tahun 1979 seorang tentara mengambil dirinya dari keluarga di Buikarin. Orang tua Isabelinha awalnya menolak untuk menandatangani “surat adopsi” yang ditawarkan, namun akhirnya menyetujui karena merasa terancam. Isabelinha kemudian berganti nama menjadi Serlina Sembel setelah berganti agama Protestan, mengikuti keluarga yang membawanya.

*Sebelum saya dipisahkan dari ayah saya, dia berkata, “Kamu harus kuat, jujur, dan berani.” Saya teringat kata-kata ini terus-menerus. Ketika orang-orang yang membawa saya kejam kepada saya, saya berpegang pada kata-kata tersebut. Saya berpegang pada kebenaran. Saya bukan diambil tidak jelas asalnya. Tapi karena dia [yang membawa saya ke Indonesia] seorang tentara, dia selalu benar. Saya hidup di bawah tekanan, kekerasan; saya mengalami itu semua. Tapi saya menjadi kuat.*

*Waktu tinggal dengan bapak tentara itu, dari tahun 1979-84, mereka memperlakukan saya dengan kasar kadang makan tidak dikasih. Saya kadang kerja jualan es, kalau sudah laku baru boleh pulang. Waktu itu saya usia 5 tahun. Pagi-pagi jam 3 saya sudah bangun, cuci baju semua, pekerjaan rumah saya kerjakan sampe kaki saya luka-luka semua kena kutu air. Pulang sekolah harus bantu-bantu juga cuci baju dulu cuci piring segala macam pekerjaan ... kemudian jualan es. Tentara yang dekat rumah lihat kasian juga. Kadang isteri tentara itu sembunyi-sembunyi kasih makanan, tapi saya takut, karena bapak tidak boleh kalau saya dikasih apa-apa, malulah sama tetangga.*

*[Saya merasa] asing karena tidak terbiasa dengan panggilan Serlina, jadi kenalan dengan nama Lina saja. Hati rasanya tidak menerima, malu rasanya, kayak nggak pas aja di hati seperti bukan diri saya itu. Kadang kalau dipanggil Serlina, tidak mau menoleh, kalau dipanggil Lina baru menjawab ... sampai sekarang. Ingat nama diganti, ingat pengalaman pahit [karena] waktu ketemu orang tua, mama bilang, pantasan sulit dicari karena namanya diganti.*

Lina selalu berharap untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Dia bahkan bermimpi bahwa rumahnya terkena gelombang tsunami raksasa dari Laut Timor. Dalam mimpinya, dia memegang suami dan anak-anaknya dan berkata, “Jangan takut. Ini di Laga. Saya dulu di sini ketika saya masih kecil. Saya dibawa dari sini.” Isabelinha tidak menyangka bahwa mimpi tersebut membawa dia kepada sesuatu yang selama ini dia rindukan.

*Sepupu saya datang, dan saya menangis di kamar saya. “Tuhan, apakah ini benar?” Anak saya berlari ke kamar saya, mengatakan, “Ibu, saudaramu di sini. Wajahnya persis seperti ibu.” Ketika saya melihatnya, dia benar-benar tampak seperti saya. Sepupu saya masuk ke dalam rumah dan langsung menelepon orang tua saya. Saya menceritakan kepada mereka seluruh perjalanan hidup saya. Mama saya menyuruh kakak saya untuk cek saya, “Dahinya menonjol dan dia memiliki tanda luka bakar di lengannya.” Semuanya cocok. Ketika saya berbicara dengan mama saya di telepon, dia bertanya, “Apa kamu masih ingat Tetum, tidak?” Saya bilang, “Ya, saya hanya ingat kalimat ‘rou Dili seidauk mai’—perahu dari Dili belum tiba. Ayah saya sering menyanyikan lagu ini ketika dia sedang berburu: ‘Imi atu ba nebe ...’ Itu saja yang saya tahu.” “Nah itu saja,” kata ibu saya. “Namamu Isabelinha de Jesus Pinto. Kamu biasa dipanggil Nina.” Akhirnya saya bisa bertemu kembali dengan keluarga saya.*

### Terasing dan dikungkung rindu

Anak-anak yang tinggal dengan keluarga di Indonesia menghadapi situasi dan budaya baru yang berbeda dengan tempat asal mereka. Pemisahan anak-

anak dari identitas, budaya, dan etnisitas mereka telah menimbulkan penderitaan besar pada anak-anak dan keluarga mereka. Rasa terasing membuat mereka selalu rindu untuk kembali bersama keluarga. Sejak dibawa, mereka tidak

<sup>23</sup> Disarikan dari kesaksian Isabelinha Pinto dalam Dengar Kesaksian KKPK di Jakarta, 26 November 2013.

berkomunikasi lagi dengan orang tua dan keluarga. Hanya sedikit orang tua angkat yang bercerita tentang asal usul mereka di Timor-Leste. Sebagian orang tua lainnya tidak pernah menceritakan atau malah meminta agar anak-anak melupakan keluarga mereka.

Karena rasa rindu Victor da Costa, yang diambil oleh seorang PNS pada tahun 1980 saat dia duduk di kelas 3 SD, secara gigih terus mencari keberadaan keluarganya. Pada tahun 2004, ia mengambil inisiatif untuk mencari keluarganya di Timor-Leste dengan bantuan Yayasan HAK.

*Hati saya terus merasa tidak tenang. Kapan saya bisa menemukan jalan untuk kembali ke Timor-Leste? Bahkan saya tidak tahu seperti apa Timor-Leste. Saya tidak tahu di mana Dili. Saya diambil dari Baguia, bapak angkat saya sering menceritakan kisah ini. 'Kamu diambil dari Baguia, ayahmu bernama Alberto, nama ibumu Maria.' Itu menambah motivasi untuk mencari keluarga saya, apakah mereka masih hidup?<sup>24</sup>*

Dalam workshop pemulihan sebelum reuni, Muhammad (Legibere) menceritakan bahwa kebahagiaan dalam hidupnya adalah kenangannya tentang kampung halaman, yang ternyata menjadi kekuatan dan harapan untuk bisa berjumpa lagi dengan keluarga.

*Gambar ini banyak pohon-pohon karena masa kecil saya dikelilingi pohon-pohon dan lembah, saya tinggal di hulu sungai Manatutu. Waktu itu hidup damai, setelah perang kami berpencar-pencar ke mana-mana. Orang tua kami mengamankan kami 4 orang bersaudara, meski kemudian saya terpisah ke Indonesia. Tempat saya ini kampung Watukalung sekarang jadi Laklubur Kabupaten Manututu. Rumah saya dekat kebun, sawah. Setelah itu Indonesia datang, semua yang saya dambakan dengan keluarga akhirnya sirna dan saya tidak pernah lihat lagi sampai saya ke Indonesia dibawa tentara.<sup>25</sup>*

## Gamang karena berganti identitas

Saat tiba di Indonesia sebagian besar anak-anak ini dipaksa berganti identitas dan agama mengikuti keluarga angkat mereka. Sebagian dari mereka yang diambil oleh lembaga keagamaan, dididik secara muslim dan harus mengadopsi keyakinan Islam serta menambahkan Islam diantara nama Timor mereka.

Muhammad menyatakan bahwa dia saat ini menggunakan nama pemberian orang tua angkat, sementara nama aslinya tidak ingat lagi kecuali nama panggilan Legibere. Dia pun menjadi Muslim, mengikuti keluarga angkat dengan alasan agar mudah sekolah. Sementara Siti Hapsah (Aisah), Mohamad Yanto Soares (Juliaon Soares) dan Mustaqin Alfonso Fikeke (Alfonso) diminta masuk Islam dan berganti saat dibawa ke sebuah yayasan di Dili. Mereka dijanjikan akan mendapat sekolah gratis di Indonesia. Belakangan mereka harus menemui kenyataan bahwa mereka ditelantarkan.

Ibrahim Orlando Serturio de Oliveira yang diambil sejak usia 8 tahun, dibawa ke Makassar dan dimasukkan ke pesantren dan menjadi Muslim. Menurut Ibrahim, ada sekitar 40 orang anak-anak dari Timor Timur yang tinggal di sebuah pesantren yang terletak di depan pesantren tempat tinggalnya.

Muhammad Irfan Soares bersama 6 orang anak dibawa oleh sebuah yayasan ke Makasar dengan menggunakan kapal laut. 'Muhammad' ditambahkan di depan namanya oleh seorang Ustad di pesantren di Maros.

*Saya dibawa oleh Koppasus dari pos Bikarin dengan mobil tentara. Di Viqueque bertemu dengan 6 orang anak dan dinaikkan ke truk sapi yang bawa ke Dili. Dua minggu di Dili kami diberangkatkan dengan kapal laut ke Ujung Pandang. Harapan kami untuk disekolahkan. Sampai di Ujung Pandang kami harus pindah agama, kami menangis ... padahal di kampung kami sudah dibaptis. Lalu kami*

24 Diambil dari laporan AJAR, *Long Journey Home: Assisting Timor-Leste's Lost Children to Rediscover their Family and Roots*, 2013. Dokumen internal.

25 Kesaksian Muhammad (Legibere) dalam Workshop pemulihan di Bali, 16 Mei 2015.

*dimasukan ke pesantren. Tidak diberi makan, ada teman saya yang kembali ke Timor-Timur karena tidak tahan dan dia tidak terima agama itu.<sup>26</sup>*

Pergantian nama dan agama ini menimbulkan rasa takut dan tidak percaya diri. Mereka pun khawatir bahwa dirinya tidak akan diterima kembali oleh keluarga mereka saat bertemu. Menjelang reuni Irfan Soares mengatakan, “Saya merasa kehilangan, seperti tidak kembali karena nama sudah diganti, jadi mungkin orang di rumah nggak kenal lagi. Yang kedua, agama diganti. Saya takut kalau pulang ke kampung keluarga gak terima.”

### *Mengalami trauma dan cacat fisik akibat perang*

Anak-anak yang direkrut sebagai TBO seringkali mengalami trauma dan cacat fisik yang berdampak hingga kehidupan mereka kini. Mereka masih dihindangi rasa takut dari kekerasan yang mereka alami atau saksikan. Mereka juga merasa khawatir akan mendapat tekanan dari masyarakat di kampung mereka di Timor-Leste karena hubungan mereka dengan militer Indonesia. Sebagian dari mereka pun masih mengingat Timor-Leste sebagai daerah konflik seperti saat mereka pergi ke Indonesia.

Ketakutan dialami oleh Fadli Muslimin saat akan mengikuti reuni pada Mei 2016. Menjelang keberangkatan ia bahkan menyerahkan buku tabungannya kepada anaknya, dan memberikan keterangan fisik yang berbeda kepada adiknya yang akan dia temui di Timor-Leste.

*Saya orang yang paling terakhir menuruni tangga pesawat. Saya berpikir untuk tidak turun dari pesawat. Saya sangat takut, takut ada orang yang menembak saya. Saya bukan takut mati, tapi saya ingat istri dan anak saya yang saya tinggalkan di Jakarta, kalau saya mati, kasihan mereka karena tidak ada yang menghidupinya ... Saya menyampaikan ke adik saya kalau ciri-ciri saya sekarang, saya gundul dan badan tinggi besar atau kekar. Awalnya adik*

*saya kaget dan seakan tidak percaya, tapi saya sampaikan bahwa saya berpostur seperti itu karena saya kuliah di olah raga. Adik saya pun menjadi percaya.<sup>27</sup>*

Rasa takut dan cemas juga dialami oleh Luwis Hutajulu (Luis Parera). Meskipun memiliki kehidupan yang cukup baik dan tinggal dengan orang tua yang mengasuhnya dengan baik, namun kehidupan Luwis tidak mulus. Ia putus sekolah, menjadi preman di pasar dan menderita sakit parah. Ia menuturkan kecemasannya sebelum mengikuti reuni,

*Sebelum jajak pendapat tahun 1999, pernah kontak dengan keluarga, namun setelah jajak pendapat, tidak bisa kontak lagi. Tahun 1997 itu kontak dengan adik, Francesco, kabar orang tua masih hidup. Keluarga suruh pulang tapi saya udah takut, karena asal usul dari sana sebagai TBO, jadi trauma tidak mau ingat lagi, apalagi ingat orang dibunuh di depan kita.<sup>28</sup>*

Beberapa orang lainnya, seperti Victor da Silva, masih harus tinggal di Rumah Sakit Veteran di Bintaro hingga kini karena mengalami gangguan psikologis. Kondisi kejiwaan Victor terganggu dan tidak ingat lagi asal usulnya setelah seluruh menyaksikan seluruh keluarganya dibunuh. Pendengaran Victor juga tidak berfungsi baik, karena sempat terkena tembakan kali di kepala dan telinganya. Marciano Alves dan Marthino mengalami cacat permanen di kaki mereka akibat tembakan dan harus mengenakan kaki palsu.

### *Mengalami eksploitasi, perbudakan, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi*

Banyak anak yang diambil tersebut mengalami kekerasan. Tanpa adanya perlindungan dari orang dewasa, mereka diperlakukan sebagai pekerja kasar atau bahkan dipekerjakan sebagai budak tanpa mendapat bayaran. Perlakuan ini merupakan bagian dari tindakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.

26 Wawancara dengan Muhammad Irfan Soares, Gowa, Sulawesi Selatan, 24 Agustus 2015.

27 Wawancara dengan Fadli Muslimin, Makassar, Sulawesi Selatan, 23 Agustus 2015.

28 Wawancara dengan Luis Parera tanggal 24 Agustus di Bekasi, Jawa Barat.

Aisah menceritakan pengalamannya:

*Pada 1994 saya dibawa oleh seorang tentara. Katanya saya mau disekolahkan tapi kemudian tidak disekolahkan. Saya dibawa ke orang lain, menjadi pembantu. Tiap hari saya nyuci, tapi ndak sekolah ... Saya kemudian dibawa ke Bandung sama dua adik laki-laki saya ... pernah ngasih air panas ke muka saya. Saya diperlakukan seperti binatang.<sup>29</sup>*

Baik keluarga angkat maupun lembaga amal atau keagamaan yang mengambil anak-anak tersebut, sering memperlakukan anak-anak secara kasar bahkan melakukan kekerasan dan memaksa para anak untuk melakukan pekerjaan berat. Saimo (Wersimo da Costa) dan Roberto da Silva juga mendapat perlakuan buruk dan dipaksa bekerja sebagai tukang kebun dan ternak milik keluarga angkatnya. Saimo, sebagaimana banyak anak lain, tidak bisa membaca dan menulis sama sekali.

Dominggus Sampelan bercerita:

*Tahun 1979 saya dibawa ke Indonesia. Saya ikut dengan harapan dapat kehidupan yang lebih baik, melanjutkan sekolah menjadi pendeta, sehingga kalau pulang bisa beri kehidupan yang lebih baik pada saudara-saudara di kampung. Di Jakarta saya disekolahkan sampai SD, ekonomi orang tua angkat juga pas-pasan sehingga saya tidak bisa sekolah lebih tinggi ... tidak kuat dengan orang tua karena banyak pekerjaan. Bapak angkat saya keras ... saya pernah digantung, kaki ke atas... lalu selebihnya saya berontak.<sup>30</sup>*

### Anak perempuan: rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi berbasis gender

Meskipun mayoritas anak-anak dicuri adalah anak laki-laki yang dijadikan TBO, kami juga mengidentifikasi sejumlah kecil perempuan yang diambil. Banyak dari korban perempuan ini mengalami eksploitasi sebagai pekerja rumah tangga tanpa dibayar. Beberapa orang melaporkan pelecehan seksual, namun

merasa sangat sulit untuk berbicara tentang pengalaman ini. Salah satu yang selamat mengatakan, "Ternyata orang yang membawa saya punya motif lain. Dia ingin saya menjadi istrinya."

Rosnaeni (Rosita) dan adiknya terpisah dari keluarganya di Railakolete pada 1978. Walau menolak, dia dibawa oleh prajurit dari Batalyon 612 ke Makasar, dan terpaksa bekerja keras untuk mempertahankan hidup karena orang yang membawanya justru menelantarkannya.

*Saya tinggal lama bersama orang tua dari bapak tentara itu. Saya bekerja ke sawah, menjaga ternak, pekerjaan ini saya lakukan setiap hari, saya tidak disekolahkan karena sekolah jauh dari rumah. Saya tinggal disana lebih dari 10 tahun, menajak remaja saya sudah merasa berat membantu orang tua bapak tentara itu, dan saya berpamitan untuk mencari pekerjaan lain. Saya pergi kerja di toko di Rante Pao, gaji saya di situ Rp 15.000 satu bulan. Selama tiga bulan saya bekerja disitu, lalu saya kerja di perkebunan PT Buntu Marannu selama 3 tahun. Selanjutnya saya dipindahkan ke BMS cabang PT Buntu Maranu. Di perusahaan ini saya bertemu dengan suami saya, saya menikah tahun 1989.<sup>31</sup>*

Perlakuan buruk juga mereka dapatkan karena mereka tidak disenangi oleh pihak keluarga yang menjadi tempat hidup mereka. Vilomena de Fatima Viana, dibawa pada tahun 1979 saat masih berumur 7 tahun. Setelah beberapa tahun hidup dengan nyaman, hubungan dia dengan keluarga angkatnya mulai tidak harmonis ketika orang tua angkat mereka memiliki anak sendiri. Ketika beranjak dewasa, ibu angkat mulai merasa cemburu dengan dirinya, akibatnya ia sering menjadi sasaran kemarahan dan tidak jarang dipukul. Tidak tahan dengan perlakuan orang tua angkat, Vilomena meninggalkan rumah orang tua angkat dan mencari hidup sendiri. Saat anak-anak perempuan ini mendekati dewasa, kebanyakan ibu angkat mulai menganiaya mereka karena menilai bahwa si anak perempuan menjadi ancaman bagi pernikahannya.

<sup>29</sup> Kesaksian Aisah dalam workshop pemulihan di Bali, 16 Mei 2015.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Dominggus Sampelan, Bekasi, Jawa Barat, 24 Agustus 2014.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Rosita, Makassar, Sulawesi Selatan, 26 September 2015.



**Rosa bertemu kembali dengan kakaknya.** Rosa diambil oleh tentara Indonesia pada tahun 1978 ketika ia dan kakaknya terpisah dari keluarga mereka. Kakaknya mencoba menghalangi agar Rosa tidak diambil, tetapi gagal. Rosa dibawa ke Sulawesi lalu bekerja di pertanian, dan mengalami kekerasan dan eksploitasi. Dia akhirnya dapat bertemu dengan kakaknya setelah terpisah 38 tahun. *(Michael Morgan untuk AJAR, 2016)*

### *Hidup telantar: Kondisi ekonomi yang sulit dan tidak mendapat pendidikan serta pekerjaan yang layak*

Banyak anak yang hidup bersama keluarga angkat dengan kondisi ekonomi yang sulit. Sehingga, walaupun mendapat perlakuan baik, beberapa dari mereka harus putus sekolah karena tidak ada biaya. Hal ini dialami Abdul Rahman (Jose Soares) yang diangkut dalam peti kayu ke kapal pada 1980 oleh anggota Batalyon 721. Saat ini dia tinggal bersama istri dan tiga anaknya di sebuah rumah kecil di daerah rawa dan sering tergenang air jika sedang musim hujan. Sehari-hari Abdul Rahman bekerja sebagai tukang sapu di gedung olah raga Kota Samarinda. Abdul Rahman menceritakan bahwa bapak angkat dia sangat baik namun setelah bapak angkatnya meninggal, dia tidak bisa melanjutkan sekolah karena kondisi ekonomi yang buruk.

Banyak anak-anak yang kemudian hidup terlunta-lunta di jalanan karena tidak kuat menghadapi kekerasan dari keluarga angkat atau yayasan tempat mereka tinggal. Mereka umumnya rentan mengalami kekerasan baru. Di Semarang, tim AJAR mengidentifikasi seorang anak bernama Hasan yang hidup terlantar dan berpindah-pindah setelah keluar dari rumah orang tua angkatnya. Dia tidak bisa berbicara dan memiliki pendengaran yang kurang baik. Setelah ditemukan di jalanan pada tahun 2015, informasi tentang Hasan belum berhasil didapatkan kembali.

### *Kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan*

Meski sudah tinggal di Indonesia, sebagian besar anak-anak yang dipisahkan dari Timor-Leste ini tidak memiliki dokumen kependudukan secara lengkap atau data dalam dokumen yang mereka miliki tidak sama, terutama setelah mereka berganti nama. Hal ini menyulitkan mereka dalam mengakses layanan publik, program bantuan pemerintah maupun saat membuat dokumen lain seperti paspor. Mereka kesulitan membuat akta kelahiran karena orang tua kandung bukanlah warga Negara Indonesia, sementara itu mereka pun tidak memiliki dokumen adopsi resmi karena pengambilan mereka ke Indonesia tidak dilakukan secara resmi dan tidak didukung oleh penetapan dari pengadilan.

Beberapa orang yang mengurus paspor untuk mengikuti reuni sempat mengalami kesulitan akibat ketidaklengkapan dokumen tersebut. Kesulitan semakin besar karena pengetahuan aparat terkait konflik di Timor-Leste sangat terbatas dan prosedur yang kaku dan rumit. Muhammad Ridwan (Joao Soares), yang dibawa oleh anggota Batalyon 726 pada saat berumur 9 tahun, sempat mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen, mulai dari pembuatan KTP sampai pembuatan paspor. Proses baru bisa berjalan dengan lancar setelah Ridwan didampingi oleh KontraS Sulawesi.

*Seandainya saya sendiri yang mengurus mulai kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan paspor, mungkin saya tidak akan bisa ikut reuni. Kartu Keluarga saya harus diperbaiki di Catatan Sipil ... Kemudian KTP saya juga belum ada, padahal saya sudah difoto untuk KTP di kantor Kecamatan. Begitupun pada saat saya mengurus paspor di kantor Imigrasi, orang Imigrasi mempertanyakan perbedaan nama orang tua di kartu keluarga dengan ijazah saya ... Untung Pak Nasrum [dari KontraS Sulawesi] menyampaikan kepada petugas administrasi bahwa saya adalah salah satu anak-anak yang pada saat terjadi konflik di Timor-Timur terpisah dari keluarga karena dibawa ke Indonesia. Akhirnya petugas Imigrasi menyodorkan form khusus yang harus*

*diisi untuk menjadi catatan dan menegaskan nama saya yang tertera di KK, KTP dan ijazah adalah benar, kemudian saya tanda tangani.<sup>32</sup>*

### Tantangan saat reuni

Sejumlah anak yang terlibat dalam reuni diminta untuk menjalankan kewajiban dan membayar upacara sebagai bagian dari adat saat mereka kembali ke keluarga mereka di Timor-Leste. Beberapa orang harus membiayai upacara adat yang cukup mahal terutama ketika nama mereka telah dituliskan di batu nisan karena dianggap telah meninggal. Beberapa orang lain, keluarga angkat yang mengurus si anak diharapkan membayar kompensasi.

Abilio Maia dibawa ke Panti Asuhan Seroja di Dili pada tahun 1977. Setahun kemudian seorang perwira militer membawanya ke Jakarta. Ia dibesarkan dengan baik, dan mendapat pendidikan tinggi serta pekerjaan. Tetapi ia terus mencari keluarganya. Pada 2013, ia berpartisipasi dalam workshop AJAR di Dili. Pada saat itu dia telah mengetahui bahwa orang tuanya sudah meninggal. Dia masih terus mencari adiknya yang sebelumnya dia ditemukan pada tahun 1993 tetapi kemudian kehilangan kontak:

*Pada suatu waktu di tahun 1993, saya bisa menemukan informasi tentang adik saya. Melalui proses mediasi kami mampu bertemu muka. Namun, ada kebiasaan dan tata cara yang mahal, dan kita harus membayar belis (mahar) yang mahal untuk mengimbangi biaya mengurus adik kami. Pada akhirnya dia dibawa kembali oleh orang yang mengurus dia.*

### Tidak mendapat jaminan keamanan dan kepemilikan atas lahan

Saat gelombang pengungsi dari Timor-Leste tiba di Makasar pasca Jajak Pendapat tahun 1999, mereka ditempatkan di lokasi Racing Center.

Anak-anak yang dipindahkan dari Timor-Leste yang sudah menetap di Makasar dan tidak memiliki pekerjaan tetap, kemudian bergabung bersama para pengungsi.

Pemerintah Indonesia menetapkan program transmigrasi bagi para pengungsi dan menyediakan wilayah Satuan Pemukiman (SP) I, yang terletak di Desa Puncak Indah dan SP II di desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, serta di Desa Sejati Tobadak Delapan, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Sekitar 50 Kepala Keluarga tinggal di SP I dan 150 Kepala Keluarga di SP II. Mereka diberi lahan untuk tinggal, juga lahan pekarangan dan berkebun. Akan tetapi lahan pekarangan dan lahan berkebun sampai sekarang belum jelas lokasinya.

Muhammad Ifran Soares yang ikut transmigrasi pada tahun 2000, menyampaikan:

*Lahan yang pasti hanya untuk tempat tinggal, lahan pekarangan dan berkebun sampai sekarang belum diketahui tempatnya, karena tidak jelas lokasinya di lapangan, hanya ditunjukkan oleh UPT (petugas transmigrasi) ke arah kawasan hutan untuk mencari masing-masing lahannya.<sup>33</sup>*

Menurut Ifran mereka harus bekerja keras untuk membuka areal hutan, dan menanam tanaman jangka pendek seperti kacang-kacangan, labu dan pisang. Namun kondisi tanah di tempat tersebut kurang subur karena kandungan nikel dan besi yang tinggi. Persoalan lebih besar dihadapi oleh mereka yang tinggal di SP II, berbeda dari SP I, karena status kepemilikan tanah belum jelas walau mereka telah bermukim di sana selama 16 tahun. Ketidakjelasan ini membuat mereka khawatir bahwa pada suatu saat tanah mereka akan diambil kembali oleh pemerintah atau diserobot oleh perusahaan perkebunan atau tambang yang saat ini sudah mulai dibuka di sekitar lokasi mereka tinggal.

32 Wawancara dengan Muhammad Ridwan, Gowa, Sulawesi Selatan, 23 Agustus 2015.

33 Wawancara dengan Muhammad Ifran Soares tanggal 24 Agustus 2015 di Gowa, Sulawesi Selatan.



#### Masih mencari.

Saat kami membawa sekelompok anak-anak yang dicuri kembali ke rumah mereka di Timor-Leste, beberapa orang mendekati kami sambil menyerahkan foto-foto lama anak-anak mereka yang hilang. (Michael Morgan untuk AJAR, 2016)

## Rekomendasi

Perlu dilakukan upaya yang serius untuk membantu menyatukan kembali anak-anak yang dicuri dari Timor-Leste dengan anggota keluarga mereka. Meskipun sekarang mereka telah dewasa, pengambilan mereka harus dilihat sebagai pelanggaran HAM yang masih berlangsung. Oleh karena itu, langkah nyata harus dibuat untuk membantu mereka bersatu kembali dengan keluarga mereka dan membangun kembali kehidupan mereka.

Kepada pemerintah Indonesia dan Timor-Leste:

- Memperlajari dan melaksanakan rekomendasi CAVR dan KKP yang berkaitan dengan anak-anak yang dipisahkan dan pencarian orang hilang. Terutama menerapkan rekomendasi KKP nomor 5, “[B]ahwa bagi untuk menghormati mereka yang telah menderita atau terkena dampak pelanggaran HAM tahun 1999 dan sebelumnya, termasuk mereka yang pernah ditahan, dibunuh atau hilang, perlu program-program yang layak bagi keluarga-keluarga mereka.”<sup>34</sup> Termasuk merancang, lewat konsultasi dengan korban dan masyarakat sipil, mekanisme bilateral untuk memfasilitasi pertemuan keluarga secara sukarela dan menindaklanjuti

laporan tentang orang hilang berdasarkan prinsip rekonsiliasi.

- Bekerja sama dalam mengimplementasikan rekomendasi KKP untuk membentuk sebuah komisi untuk, “bekerja sama untuk mendapatkan informasi mengenai bagi orang-orang yang hilang dan bekerja sama untuk mengumpulkan data dan memberi informasi,”<sup>35</sup> termasuk informasi mengenai lokasi dan kondisi semua anak Timor-Leste yang dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka.
- Mendukung dan mendanai upaya masyarakat sipil di kedua negara untuk melacak, mendokumentasikan, dan memenuhi kebutuhan anak-anak yang dicuri dan anggota keluarga mereka.
- Membuat mekanisme untuk memfasilitasi reuni anak-anak yang dicuri yang telah diidentifikasi dalam jumlah yang lebih besar. Mekanisme ini dapat dikembangkan bersama-sama dengan masyarakat sipil, lembaga internasional yang relevan (ICRC, IOM, atau badan dalam PBB), kementerian, dan lembaga HAM di dua negara, Komnas HAM dan PDHJ.

Kepada Pemerintah Indonesia:

- Memberikan bantuan, pemulihan trauma dan perlindungan kepada korban, dan mengakui mereka sebagai korban pelanggaran HAM berat yang berhak atas perlindungan dan pelayanan yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Menjunjung tinggi hak-hak anak yang dicuri. Khususnya dalam membantu mereka dalam memperoleh identitas dan dokumen kewarganegaraan (KTP, akta kelahiran, dan paspor).
- Memberikan beasiswa dan bantuan ekonomi kepada anak-anak yang dicuri dan keluarga mereka.
- Memberikan informasi tentang keberadaan anak-anak yang dicuri dan orang hilang.

34 Rekomendasi 5. Komisi untuk Orang-orang Hilang, *Per Memoriam Ad Spem: Laporan Akhir KKP*, hal. 331.

35 Ibid.



- Mendukung penyebaran informasi terbaru dan akurat tentang Timor-Leste dan hubungan baiknya dengan Indonesia, khususnya di kalangan aparat lokal yang bersentuhan dengan masyarakat Timor di Indonesia.

#### Kepada Pemerintah Timor-Leste:

- Menyediakan dokumen resmi tentang tempat dan tanggal lahir bagi anak yang dicuri, dan mengakui bahwa mereka tidak mungkin memiliki akta kelahiran atau bukti hukum lain karena mereka diambil secara paksa sewaktu anak-anak.
- Memberikan status bebas visa bagi anak-anak yang dicuri dan keluarga mereka yang ingin mengunjungi Timor-Leste, mengakui bahwa anak-anak yang diambil oleh warga Indonesia mungkin berkeinginan untuk tetap berada di Indonesia, terutama jika anak-anak mereka tinggal di Indonesia.
- Memfasilitasi dukungan dan bantuan kepada anak-anak yang dicuri yang ingin kembali ke Timor-Leste.
- Membentuk lembaga lanjutan CAVR untuk mendokumentasikan anak hilang karena konflik, memelihara ingatan tentang anak-anak yang dicuri dan membantu merehabilitasi korban.
- Mendorong agar pendekatan adat dan tradisi dalam penerimaan anak-anak yang dicuri dilaksanakan tanpa membebani korban.

#### Kepada Komnas HAM dan PDHJ:

- Untuk Komnas HAM: Mengakui anak yang dicuri sebagai korban pelanggaran HAM berat berdasarkan penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM tentang Timor Timur.

- Untuk Komnas HAM: Menjadi ujung tombak pencarian anak-anak yang dicuri berdasarkan informasi dari sumber-sumber militer dan arsip yang tersedia.
- Untuk PDHJ: Melanjutkan kerjasama dengan masyarakat sipil dan lembaga pemerintah untuk merehabilitasi hak-hak korban di Timor-Leste.
- Untuk PDHJ dan Komnas HAM: Menegaskan kembali komitmen untuk mengadvokasi kebijakan yang melindungi dan membantu menyatukan kembali anak-anak yang dicuri dengan keluarga mereka di Timor-Leste.

#### Kepada Komunitas Internasional:

- Mendukung inisiatif organisasi masyarakat sipil dari Indonesia dan Timor-Leste ini yang terlibat dalam membantu dan mengupayakan penyelesaian untuk anak-anak yang dicuri.
- Memperkuat ikatan hukum bagi pemerintah untuk melanjutkan pencarian untuk anak-anak diculik dengan mengakui bahwa penculikan merupakan pelanggaran HAM yang masih terus berlangsung, sampai korban penculikan dapat bersatu kembali dengan keluarganya.
- Mendukung dan mendorong pemerintah Indonesia dan Timor-Leste untuk melaksanakan rekomendasi CAVR dan KKP, terutama dalam kasus anak-anak yang dipindah secara paksa dari Timor-Leste ke Indonesia.
- Mengambil langkah-langkah untuk mempublikasikan dan memelihara fokus pada kasus anak-anak yang dicuri dari Timor Leste, sehingga mengurangi potensi kejahatan serupa yang akan dilakukan di masa depan.

## Lampiran 1: Rekomendasi dari CAVR dan KKP

### CAVR

#### 11.2 Anak-anak yang terpisah

Banyak anak-anak Timor-Leste yang terpisah dari keluarganya selama pendudukan Indonesia terhadap Timor-Leste, termasuk sekitar 4500 yang terpisah dari keluarganya pada tahun 1999. Banyak diantara mereka yang terpisah sebelum tahun 1999 yang sekarang sudah dewasa, termasuk juga mereka yang mencari keluarganya tapi tidak mengetahui asal-usul mereka. Kebanyakan dari mereka yang terpisah dari keluarganya selama kejadian tahun 1999 telah dipertemukan kembali dengan keluarganya atau tetap bersama dengan mereka yang memungutnya. Tanggung jawab terhadap kategori ini ada pada Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste sesudah penandatanganan "Memorandum Kesepahaman mengenai Kerjasama untuk Melindungi Hak Anak-anak yang Terpisah dan Pengungsi Anak," pada bulan Desember 2004, yang difasilitasi oleh UNHCR.

Komisi merekomendasikan agar:

11.2.1 Penerapan Memorandum Kesepakatan 2004 antara Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Republik Indonesia agar diawasi oleh LSM-LSM di kedua Negara bersangkutan untuk menjamin perlindungan bagi hak-hak anak-anak yang terpisah, terutama mereka yang kasusnya masih belum diselesaikan dan mereka yang berada di tangan wali mereka –termasuk hak anak-anak tersebut untuk dengan bebas mengakses prosedur identifikasi dan kewarganegaraan;

11.2.2 Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia memastikan agar komunikasi yang teratur dan bebas tetap berjalan antara anak dan orang tuanya sementara anak itu masih berada dengan walinya atau dengan sebuah lembaga dan agar anak-anak yang terpisah dapat membuat keputusan tentang masa depan mereka, yang diambil berdasarkan informasi yang cukup, bebas dari intimidasi atau ketakutan;

11.2.3 Bantuan diberikan, terutama bagi mereka yang berada di tempat terpencil

atau miskin, agar orang tua dan anak-anak yang terpisah dari orang tuanya yang sekarang sudah dewasa dapat mencari tahu tentang keberadaan masing-masing, berhubungan dan bertemu secara langsung.

*Chega!*, Bagian 11. Rekomendasi, hal. 39; <http://cavr-timorleste.org/cheqaFiles/finalReportIndo/11-Rekomendasi.pdf>

### KKP

#### 5. Komisi untuk Orang-orang Hilang

Komisi memandang bahwa bagi untuk menghormati mereka yang telah menderita atau terkena dampak pelanggaran HAM tahun 1999 dan sebelumnya, termasuk mereka yang pernah ditahan, dibunuh atau hilang, perlu program-program yang layak bagi keluarga-keluarga mereka. Implementasi program-program ini dapat dilakukan secara bersamaan oleh masing-masing negara.

Komisi merekomendasikan agar: Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste bekerja sama untuk mendapatkan informasi mengenai bagi orang-orang yang hilang dan bekerja sama untuk mengumpulkan data dan memberi informasi.

Komisi tersebut tersebut di atas juga ditugaskan untuk mengidentifikasi mengenai keberadaan semua anak-anak Timor-Leste yang terpisah dari orang tuanya dan untuk memberi tahu keluarga mereka. Komisi juga merekomendasikan untuk meneruskan program-program yang sebelumnya dilakukan untuk menjamin perlindungan hak anak-anak yang dipindahkan, terutama bagi mereka yang kasus-kasusnya belum diselesaikan dan mereka yang masih berada di bawah penyaliaan orang-orang Indonesia, termasuk hak anak-anak tersebut untuk secara bebas mengakses prosedur-prosedur mendapatkan identitas dan kewarganegaraan. Prioritas perlu diberikan untuk program-program pendidikan dan beasiswa untuk anak-anak yang pernah menjadi korban kekerasan.

*Per Memoriam Ad Spem*, Bab. 9 Pelajaran yang Didapat dan Rekomendasi, hal. 331; <http://www.chegareport.net/wp-content/uploads/2014/10/CTF-laporan-akhir-20081.pdf>



